

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar dan analisa terhadap pelaporan kinerja melalui LAKIP tahun 2014 dan 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Renstra Kantor Ketahanan Pangan 2011-2015 telah menggambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, program serta target indikator kinerja sasaran dan realisasinya. Secara umum target telah tercapai dengan baik dimana semua target IKU dapat direalisasikan melebihi target 100,00%.
- 2) Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sudah ekonomis yang terlihat dari penghematan yang dilakukan disetiap kegiatannya. Secara total pada tahun 2014, Kantor Ketahanan Pangan melakukan penghematan sebesar Rp86.558.892,00 dari total anggaran tahun Rp1.690.403.585,00 atau sebesar 5,12%. Pada tahun 2015 terdapat penghematan sebesar Rp225.247.000,00 dari total anggaran Rp1.341.505.000,00 atau sebesar 26,79%. Pada tahun 2014 kegiatan dengan penghematan terbesar yaitu kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp1.210.503.000,00 atau 93,61% dari total anggaran yang sebesar Rp1.293.153.585,00. Di tahun 2015 kegiatan dengan penghematan terbesar yaitu kegiatan Pengembangan Lumbung

Pangan Desa dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp407.795.500,00 atau 71,19% dari total anggaran yang sebesar Rp573.054.560,00 sehingga dapat menghemat anggaran sebesar Rp165.259.060,00 dan dengan *output* (keluaran) yang berhasil dicapai 100,00%. Rata-rata *output* pada program ini sudah mencapai 100,00%, dengan *output* tersebut dapat menghemat anggaran sebesar Rp86.345.242,00 di tahun 2014 dan Rp209.275.214,00 ditahun 2015, sehingga program ini dapat dikatakan sangat ekonomis.

- 3) Pengukuran efisiensi periode tahun 2014 diketahui bahwa program sudah berjalan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan pada tahun 2014 mencapai 101,20% dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah mencapai 101,06% . Untuk periode tahun 2015 program ini juga berjalan secara efisien. Kantor Ketahanan Pangan dapat mencapai *output* maksimum yang pada semua kegiatannya (100,00%) dengan efisiensi pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan sebesar 101,20% dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah sebesar 100,55%.
- 4) Pengukuran efektivitas pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan periode tahun 2014-2015 diketahui bahwa program telah dilakukan dengan efektif dimana semua target dapat dicapai dengan maksimal di angka 100,00%. Begitu juga dengan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah telah dilakukan dengan efektif ditahun 2014 dan 2015 juga telah mencapai 100,00%

5) Berdasarkan analisa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Renstra belum mengungkapkan “indikator kinerja tujuan” yang dijabarkan dalam renstra. Sehingga sulit untuk mengukur pencapaiannya pada tingkatan “tujuan”.
- b. Masih terdapat indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu pada kriteria *measurable* seperti terlihat pada sasaran “menanggulangi kemiskinan” dan sasaran “Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan bahan pangan masyarakat”. Sasaran tersebut tidak bisa diukur karena tidak memiliki target kuantitatif atau kualitatif yang hendak dicapai.
- c. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala. Reviu berkala bertujuan untuk melihat apakah Renstra masih relevan dengan keadaan saat dilakukan reviu. Apabila reviu sudah pernah dilakukan apakah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Perbaikan yang dilakukan juga harus direviu apakah menunjukkan kondisi yang lebih baik atau terdapat inovasi.
- d. Dalam mekanisme pengumpulan data kinerja dimana belum terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up-to-date*, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan belum terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data, serta data sumber masih sulit untuk ditelusuri ulang.

- e. Pada aspek keandalan pengumpulan data kinerja diketahui bahwa data yang dikumpulkan belum didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (bersifat dadakan). Selain itu data yang dikumpulkan tidak dilakukan pengujian tingkat kesalahan sehingga dicapai tingkat kesalahan yang minimal.
- f. IKU belum digunakan untuk mengukur kinerja individu karena IKU Unit belum di *break down* ke indikator kinerja individu . Selain itu, IKU juga belum direviu secara berkala. Reviu bertujuan untuk mengetahui kesesuaian IKU dengan kondisi saat dilakukannya reviu.
- g. Untuk pemenuhan aspek pelaporan kinerja kriteria yang tidak terpenuhi yaitu LAKIP Kantor Ketahanan Pangan tidak di-*upload* ke dalam *website*
- h. Informasi yang disajikan dalam LAKIP Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi orientasi *outcome*. Informasi LAKIP hanya berfokus pada kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, seharusnya informasi yang disampaikan dalam LAKIP tersebut adalah pencapaian kegiatan atau proses yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2015. LAKIP tidak menyajikan capaian *outcome*, hanya menyajikan *output* penting. Seharusnya, LAKIP menyajikan hasil evaluasi dan analisis capaian-capaian kinerja *outcome/output* penting dari renstra yang telah dibuat.
- i. Kinerja yang diperjanjikan telah disajikan dalam LAKIP Kantor Ketahanan Pangan tahun 2014 dan 2015. Namun tidak menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja berupa proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara jelas dan rinci

- j. LAKIP Kantor Ketahanan Pangan belum menyajikan data perbandingan yang memadai mencakup perbandingan target dan realisasi, realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya, dan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, LAKIP ini hanya menyajikan perbandingan target dengan realisasinya saja. Dari informasi terkait kualitas informasi kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar belum cukup andal, karena informasi yang disajikan belum berorientasi *outcome*, perbandingan data kerjanya belum memadai karena baru membandingkan target dan realisasi saja
- k. LAKIP belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam perbaikan maupun penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan LAKIP yang ada tidak mempunyai dampak pada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan perjanjian kinerja yang disusun. Informasi yang disajikan dalam LAKIP tahun ini merupakan suatu dokumen yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan LAKIP tahun sebelumnya dan tidak pula mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan. LAKIP hanya mampu memperlihatkan ataupun menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program secara terukur untuk tahun yang bersangkutan saja
- l. Penggunaan nomenklatur belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kantor Ketahanan Pangan masih menggunakan nomenklatur penetapan kinerja dan LAKIP. Seharusnya sesuai peraturan tersebut nomenklatur “Penetapan Kinerja” berubah menjadi “Perjanjian Kinerja” dan “LAKIP” berubah menjadi “Laporan Kinerja (LKj)”. Hal ini juga menunjukkan SDM yang bertugas dalam penyelenggaraan AKIP tidak memahami peraturan terkait dan senantiasa meng-*update* pengetahuannya dalam penyelenggaraan SAKIP.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, poin-poin utama rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meskipun dalam penilaian ekonomi, efisien dan efektif menunjukkan bahwa kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Datar berkinerja sangat baik, namun dalam analisis terhadap indikator yang digunakan menunjukkan bahwa indikator yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang baik. Sehingga hal tersebut menimbulkan keraguan terhadap apa yang dilaporkan dalam LAKIP yang menjadi objek penelitian ini. Untuk itu diperlukan perbaikan terhadap indikator-indikator yang digunakan yaitu:
 - a. Dalam penyusunan rencana strategis “Tujuan” dibuat dan ditetapkan dengan menyertakan indikator kinerja tujuannya. Indikator tersebut haruslah memenuhi kriteria *Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance dan Timebound* (SMART). Penentuan indikator juga harus

mempertimbangkan kontribusi Kantor Ketahanan Pangan, apakah suatu target jika dicapai merupakan kontribusi individual instansi atau merupakan kontribusi gabungan dengan instansi lain. Hal ini juga merupakan bagian dari kriteria SMART yakni target yang ditetapkan bisa dicapai dan diukur oleh instansi bersangkutan.

- b. Meningkatkan pemahaman penyusun dokumen perencanaan terutama dalam memenuhi kriteria pemenuhan indikator kinerja kegiatan. Diharapkan penyusun dokumen perencanaan mendapatkan pemahaman terhadap indikator kinerja kegiatan yaitu *input, output* dan *outcome*.
 - c. Menyelaraskan indikator kinerja unit sampai kepada indikator kinerja individu pegawai. Hal dapat dilakukan dengan melakukan *breakdown* IKU unit menjadi indikator kinerja individu sehingga jelas tanggung jawab masing-masing individu terhadap tercapainya indikator unit kerja. Hal ini juga untuk mengukur kinerja individu sebagai bahan pertimbangan pemberian *reward* seperti tunjangan kinerja, promosi dan bentuk *reward* lainnya.
- 2) Dalam pelaporan kinerja Kantor Ketahanan Pangan harus mencantumkan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan perbandingan tingkat realisasi sampai dengan saat ini dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra.
 - 3) Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik Kantor Ketahanan Pangan seharusnya meng-*upload* LAKIP di *website* resmi pemerintah daerah atau *website* Kantor Ketahanan Pangan jika ada.

- 4) Melakukan revidi dan evaluasi terhadap Dokumen Renstra secara berkala termasuk terhadap IKU dan pencapaiannya.
- 5) Merancang dan menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up-to-date*, kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data. Mekanisme yang dibuat sebaiknya sudah memanfaatkan teknologi informasi dan yang terpenting dimungkinkan untuk dilakukan update dan dipantau secara rutin.
- 6) Memanfaatkan LAKIP sebagai pedoman dalam perbaikan maupun penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya sehingga berdampak pada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan perjanjian kinerja yang disusun.
- 7) Melakukan perubahan nomenklatur LAKIP menjadi LKj dan nomenklatur Penetapan Kinerja menjadi Perjanjian Kinerja. Serta melakukan upaya sosialisasi peraturan terutama peraturan terbaru terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pegawai yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaporan.
- 8) Untuk penelitian selanjutnya penulis merekomendasikan untuk melakukan penelitian pada aspek indikator kinerja yang digunakan terhadap pemenuhan persyaratan indikator yang baik. Indikator kinerja yang baik memiliki kriteria *Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance dan Timebound (SMART)*. Hal ini sangatlah penting terhadap perbaikan sistem pengukuran kinerja sehingga penelitian tersebut dapat menghasilkan perbaikan signifikan terhadap kinerja pemerintah.